

**Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Industri,
Ukuran Perusahaan, Perusahaan BUMN dan Non BUMN
Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial
(*CSR DISCLOSURE*) pada Perusahaan di BEI Tahun
2009**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

DESIE RAKHMAWATI
NIM. C2C607041

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Desie Rakhmawati

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607041

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH STRUKTUR
KEPEMILIKAN, TIPE INDUSTRI,
UKURAN PERUSAHAAN,
PERUSAHAAN BUMN dan NON BUMN
TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR
DISCLOSURE) PADA PERUSAHAAN DI
BEI TAHUN 2009**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt.

Semarang, 13 Juni 2011

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt.)

NIP. 19620416 198803 1003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Desie Rakhmawati

Nomor Induk Mahasiswa : C2C607041

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Perusahaan BUMN dan Non BUMN Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (*CSR DISCLOSURE*) pada Perusahaan di BEI Tahun 2009**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 4 Juli 2011

Tim Penguji :

1. Prof. Dr. H.M. Syafrudin, M.Si., Akt (.....)
2. Prof. Drs. H.M. Nasir, M.Si., Ph.D (.....)
3. Dra. Hj. Indira Januarti, M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Desie Rakhmawati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, PERUSAHAAN BUMN dan NON BUMN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (*CSR DISCLOSURE*) PADA PERUSAHAAN DI BEI TAHUN 2009 adalah hasil tulisan tangan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau / tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil tulisan dari orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 13 Juni 2011

Yang membuat pernyataan

Desie Rakhmawati

NIM C2C607041

ABSTRACT

The research aims to analyze ownership structure, industry tipe, firm's size, BUMN company and Non BUMN company that influencing the disclosure of Corporate Social Responsibility (CSR) at the corporate's Annual Reports in Indonesia.

The population in this research are all of Indonesian firms in Indonesian Stock Exchange (IDX) 2009. Total sample in this research are 82 firms that selected with purposive sampling. Using content analysis to analyze the CSR disclosure with global annual reporting (GRI). Data analyze with test of classic assumption dan examination of hypothesis with multiple linear regression method.

Result of this research indicates industry's type, firm's size, BUMN company had a significant effect to CSR disclosure in Indonesia. In the other hand, foreign ownership and institutional ownership didn't success to give positive influence for Corporate Social Responsibility Disclosure in Indonesia.

Keywords : *Corporate Social Responsibility (CSR Disclosure),Ownership Structure, Industry Type, Firm's Size, BUMN company and Non BUMN Company*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, tipe industri, ukuran perusahaan, perusahaan BUMN dan Non BUMN terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR Disclosure*) pada laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Populasi dari penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2009. Total sampel penelitian adalah 82 perusahaan yang ditentukan melalui *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan metode *analysis content* dalam pengungkapan CSR dengan menggunakan indikator GRI. Analisis data dilakukan dengan metode regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor tipe industri, ukuran perusahaan dan perusahaan BUMN berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR Disclosure*). Di lain pihak, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab social (*CSR Disclosure*).

Kata kunci : Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial (*CSR Disclosure*), Struktur Kepemilikan, Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Perusahaan BUMN dan Non BUMN.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dan junjungan rasulku Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat atas limpahan rahmat dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “ **PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN, TIPE INDUSTRI, UKURAN PERUSAHAAN, PERUSAHAAN BUMN dan NON BUMN TERHADAP LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR DISCLOSURE) PADA PERUSAHAAN DI BEI TAHUN 2009**”. Penulisan skripsi ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Sarjana S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, doa, semangat dan bimbingan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H.Mohamad Nasir, M.si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, bimbingan dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H.Sudarno, Msi., Akt., Ph.D. Akt selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan, nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh staf pengajar, Bapak Ibu Dosen tercinta yang telah meberikan ilmu dan bekal bagi penulis sehingga berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh staf karyawan fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi yang telah memberikan pelayanan terbaik bagi mahasiswa.
6. Bapakku tersayang dan Ibu, Ibuku tercinta (Alm) yang telah memberikan doa, materi, motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Doa kalianlah yang selalu mengiringiku dalam setiap langkah dan hidupku.
7. Adikku tersayang Fatkhu Rokhaniah, terima kasih atas saran, dan doamu. Ayo berjuang untuk masa depan kita.....
8. Wicak Qu yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, dan tempat keluh kesahku. Terima kasih untuk semuanya.
9. Keluarga Bapak Gatot Suhendro yang telah memberikan dukungan dan doanya sehingga terselesaikan skripsi ini.
10. Semua temanku Reguler II kelas A jurusan Akuntansi angkatan 2007 atas semangat dan kebersamaannya selama empat tahun ini. Semangat Teman Semoga Kita Sukses di kemudian hari.
11. Irma, Dhiba, Iin, Lilis, Jidan, Vera, kalianlah teman terbaikku semasa kuliah dan terima kasih atas kebersamaannya, dan bantuannya sehingga skripsi ini selesai.
12. Teman kosku wonodri (Intan, Desi, Mbak Yun, Putri, M.Dian, Prita, Tika, Nova) terimakasih atas dukungan, pengalaman kalian selama mengerjakan skripsi.

13. Teman kosku Wisma Aditia dan Kos Barinem atas semangat dan dukungannya selama ini.
14. Teman-teman KKN q dan Bu Lurah serta Pak Lurah yang telah memberikan pengalaman yang berharga ketika terjun di masyarakat dan terselesaikannya skripsi ini.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semarang, 13 Juni 2011

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

.....Rintangan, hambatan dan kesulitan membuat kita kuat, maju dan menjadi lebih baik.....

Terimakasih atas doa, semangat, bimbingan kalian mendampingiku sehingga aku kuat seperti sekarang ini.....

Harapan ada pada masa depan..

Doa ada pada iman

Allah ada jika kita percaya

Dan Allah memudahkan jalan kita jika kita percaya pada kebesarannya

Terimakasih Allah.....

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Orang tuaku tersayang...

Semua orang yang mencintai dan menyayangiku.....

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Manfaat Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Legitimasi	8
2.1.2 Teori Stakeholder	12
2.1.3 Teori Agency	14
2.2 Corporate Social Responsibility	15
2.2.1 Pengertian dan Konsep CSR	15
2.2.2 Pengungkapan CSR di Indonesia	15
2.2.3 Kepemilikan Asing.....	18
2.2.4 Kepemilikan Institusional.....	19
2.2.5 Ukuran Perusahaan (<i>Firm Size</i>)	20
2.2.6 Tipe Industri (Industri Profile)	22

2.2.7 Kategori BUMN dan Non BUMN	23
2.3 Penelitian Terdahulu	25
2.4 Kerangka Pemikiran	28
2.5 Pengembangan Hipotesis	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	36
3.1.1 Variabel Dependen	36
3.1.2 Variabel Independen	37
3.1.2.1 Kepemilikan Asing	38
3.1.2.2 Kepemilikan Institusional	38
3.1.2.3 Tipe Industri	38
3.1.2.4 Ukuran Perusahaan	39
3.1.2.5 Kategori BUMN dan Non BUMN	40
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	40
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Metode Pngumpulan Data.....	41
3.5 Metode Analisis Data	42
3.5.1 Metode Asumsi Klasik	42
3.5.1.1 Uji Normalitas	42
3.5.1.2 Uji Multikolinearitas	43
3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas	43
3.5.1.4 Uji Autokorelasi	44
3.5.2 Analisis Regresi Berganda	45
3.5.3 Pengujian Hipotesis	46
3.4.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F Test)	47
3.4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	47
3.4.3.3 Uji Parsial (t test)	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Deskripsi Hasil penelitian	49
4.2 Analisis Data	49
4.2.1 Statistik Deskriptif	49

4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	53
4.2.2.1	Hasil Uji Normalitas	53
4.2.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas	55
4.2.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	56
4.2.2.4	Hasil Uji Autokorelasi	58
4.2.3	Hasil Pengujian Hipotesis	
4.3.1	Hasil Uji F (F Test)	58
4.3.2	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	59
4.3.3	Hasil Uji t (t test)	61
4.3	Intepretasi Hasil	64
4.3.1	Pengungkapan CSR (<i>CSR Disclosure</i>)	64
4.3.2	Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>CSR disclosure</i>).....	65
4.3.3	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>CSR disclosure</i>).....	67
4.3.4	Pengaruh Tipe industri terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>CSR disclosure</i>).....	69
4.3.5	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>CSR disclosure</i>).....	70
4.3.6	Pengaruh Kategori BUMN dan Non BUMN terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>CSR disclosure</i>).....	70
BAB V PENUTUP		
5.1	Simpulan	72
5.2	Keterbatasan Penelitian	73
5.3	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	27
Tabel 4.1 Ringkasan Perolehan Sampel Penelitian	49
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	50
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	55
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.5 Hasil Uji Durbin Watson	58
Tabel 4.6 Hasil Uji F (F Test)	59
Tabel 4.7 Hasil uji koefisien determinasi	60
Tabel 4.8 Tabel Hasil Uji t	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen ...	29
Gambar 4.1 Grafik Histogram	54
Gambar 4.2 Gambat Normal P-Plot	54
Gambar 4.3 Scatterplot	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A : Daftar Indikator Pengungkapan CSR menurut GRI

Lampiran B : Daftar Perusahaan Sampel Penelitian

Lampiran C : Daftar Pengolahan Data dengan SPSS 16.0

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemahaman mengenai CSR dapat dilihat melalui dua sudut pandang, yaitu CSR berdasarkan teori dan CSR berdasarkan realita atau fakta yang terjadi (Syafrudin, 2010). Sudut pandang yang pertama adalah CSR berdasarkan teori seperti yang diungkapkan oleh (Daniri, 2008) yang dikutip dalam Machmud dan Djakman (2008) menyatakan bahwa CSR adalah pengungkapan di dalam laporan tahunan yang tidak hanya berpijak pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan (corporate value), tetapi juga berpijak pada *triple bottom lines* yaitu keuangan, sosial dan lingkungan. CSR berpijak pada *triple bottom lines* dikarenakan apabila perusahaan hanya memperhatikan keuangannya saja, maka perusahaan tersebut tidak dapat menjamin nilai perusahaan secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan nilai perusahaan diharapkan agar perusahaan dapat memperoleh laba dalam jangka panjang.

Sudut pandang yang kedua adalah CSR berdasarkan realita atau fakta yang terjadi yaitu kegiatan perusahaan yang menyangkut kegiatan sosial contohnya program CSR yang dijalankan oleh setiap perusahaan. Selain itu, pada perusahaan BUMN, program CSR diwujudkan dalam PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) sesuai dengan SK No. 236/MBU/2003. PKBL merupakan kewajiban perusahaan milik Negara dalam bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitarnya untuk bidang sosial, keagamaan, dan ekonomi masyarakat

baik kegiatan pengembangan masyarakat (*community development*) maupun program kemitraan di bidang ekonomi.

Pengungkapan CSR meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan dilakukan untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi korporat kepada investor atau *stakeholders*. Selain itu, pengungkapan CSR merupakan suatu media untuk menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholders bahwa perusahaan telah mengungkapkan *Corporate Sosial Responsibility* (Darwin, 2007).

Melalui pengungkapan CSR, perusahaan dapat memperoleh legitimasi social sehingga perusahaan dapat memaksimalkan kekuatan keuangannya dalam jangka panjang melalui respon positif masyarakat pada para pelaku pasar saham (Kiroyan, 2006) dalam Sayekti dan Wondabio (2007).

Perkembangan CSR di Indonesia semakin dibutuhkan seiring dengan banyaknya perusahaan multinasional maupun perusahaan transnasional. Perusahaan asing yang telah beroperasi di Indonesia terutama perusahaan Eropa dan Perusahaan dari *United of states* lebih memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh (Simerly dan Li) dalam penelitian Machmud dan Djakman (2008) bahwa kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Negara-negara Eropa dan Amerika merupakan negara-negara yang sangat memperhatikan isu-isu sosial; seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti, efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air.

Struktur kepemilikan lain yang memperhatikan masalah tanggung jawab sosial adalah struktur kepemilikan institusional. Menurut Machmud dan Djakman (2008) semakin besar kepemilikan saham institusional maka semakin efektif pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan aktiva yang dilakukan oleh manajemen. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan terhadap tanggung jawab sosial.

Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan juga dipengaruhi oleh tipe industri perusahaan. Perusahaan high profile lebih mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan dibandingkan perusahaan low profile.

Ukuran perusahaan juga mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin laus pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dibandingkan perusahaan kecil. Menurut Suropto (1999) bahwa umumnya perusahaan besar umumnya memiliki aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, system informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas.

Status perusahaan sebagai perusahaan BUMN maupun Perusahaan Non BUMN juga mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan BUMN lebih luas dalam mengungkapkan tanggung jawab social perusahaan (*CSR Disclosure*) karena perusahaan BUMN sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara atau rakyat. Dalam

melakukan kegiatan operasionalnya, BUMN diawasi langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari rakyat (Yuliarto, 2001).

Pentingnya pengungkapan CSR di dalam laporan tahunan perusahaan bagi *stakeholders*, memunculkan konsep akuntansi baru yang disebut *Sosial Responsibility Accounting* (SRA) (Anggraini, 2006). SRA merupakan perkembangan akuntansi konvensional (*mainstream accounting*) yang telah banyak di kritik oleh masyarakat karena tidak dapat memenuhi kepentingan masyarakat secara luas. Selama ini akuntansi hanya bertujuan sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik saham sedangkan di dalam SRA, pertanggungjawaban diperluas kepada seluruh *stakeholders*.

Selain itu, perkembangan CSR di Indonesia di dukung dengan adanya aturan pemerintah . Undang-undang Perseroan Terbatas Nomer 40 Tahun 2007 pasal 66 dan 74 menyatakan bahwa ; (1) pasal 66 ayat (2) bagian c menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, (2) pasal 74 menjelaskan bahwa perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam.

Kewajiban pengungkapan CSR juga diatur dalam undang-undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 pasal 15 bagian (b), pasal 17, dan pasal 34 yang mengatur bahwa setiap penanaman modal diwajibkan untuk ikut serta dalam tanggung jawab sosial.

Praktik pengungkapan tanggung jawab sosial memainkan peranan penting bagi perusahaan karena perusahaan hidup di lingkungan masyarakat dan

kemungkinan aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan alat manajerial yang digunakan perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan. Selain itu, pengungkapan tanggung jawab sosial dapat dipandang sebagai wujud akuntabilitas perusahaan kepada publik untuk menjelaskan berbagai dampak sosial yang ditimbulkan perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007).

Penelitian terdahulu tentang pengungkapan CSR yang telah dilakukan di Indonesia adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Anggraini (2006) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan CSR. Penelitian Anggraini berhasil menemukan faktor-faktor kepemilikan manajemen dan tipe industri menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan CSR. Penelitian Rosmasita (2007) berhasil menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR dalam perusahaan manufaktur antara lain : kepemilikan manajemen, leverage, ukuran perusahaan dan profitabilitas. Penelitian lain juga dilakukan oleh Puspitasari (2009) menemukan bahwa faktor kepemilikan saham asing, kepemilikan saham publik, ukuran industri dan tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR di Indonesia. Ketidakkonsistenan penelitian terdahulu ditunjukkan oleh penelitian Machmud dan Djakman (2008) bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan adanya ketidakkonsistenan yang dilakukan pada penelitian terdahulu, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul :

“ Pengaruh struktur kepemilikan, tipe industry, ukuran perusahaan, perusahaan BUMN dan Non BUMN terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR Disclosure) pada perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2009”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah struktur kepemilikan, tipe industri, ukuran perusahaan, status perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia?”. Sesuai dengan perumusan masalah ini, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?
2. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?
3. Apakah tipe industri berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?
5. Apakah status perusahaan BUMN berpengaruh terhadap luas pengungkapan CSR di Indonesia?

1.3 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan untuk semakin terdorong dalam pengungkapan tanggung jawab sosial di dalam laporan keuangan.
2. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun standar akuntansi keuangan dalam meningkatkan kualitas standar dan peraturan yang sudah ada khususnya peraturan tentang *CSR Disclosure*.
3. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari telaah teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab ini terdiri dari objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Berikut ini akan dijelaskan teori-teori yang melandasi penelitian ini, mulai dari teori legitimasi, teori *agency*, penjelasan tanggung jawab sosial perusahaan, teori stakeholders yang menyangkut akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi, definisi masing-masing variabel penelitian, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan asing, ukuran perusahaan (*firm size*), tipe industri (*industry profile*), dan status perusahaan.

2.1.1 Teori Legitimasi

Eksistensi perusahaan dapat diterima oleh masyarakat apabila perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Sebaliknya, eksistensi perusahaan tidak dapat diterima oleh masyarakat apabila perusahaan tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat atau bahkan merugikan masyarakat tersebut. Operasi perusahaan dalam posisinya sebagai bagian dari masyarakat seringkali mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu, melalui top manajemen, perusahaan berusaha untuk memperoleh kesesuaian antara tindakan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat umum dan publik atau stakeholdernya (Dowling dan Pfeffer,

1975 dalam Haniffa dan Cooke, 2005; Ani 2007) dalam Machmud dan Djakman (2008).

Eksistensi perusahaan yang terwujud dalam keselarasan antara tindakan organisasi dan nilai-nilai masyarakat tidak selamanya berjalan sesuai dengan harapan. Seringkali terjadi perbedaan potensial antara tindakan organisasi dengan nilai masyarakat yang dapat mengancam legitimasi perusahaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Sethi dalam Haniffa dan Cooke (2005); Ani (2007) dalam Machmud dan Djakman (2008) bahwa perbedaan antara organisasi dan nilai-nilai sosial dapat mengancam legitimasi yang menyebabkan berakhirnya eksistensi perusahaan.

Suchman (1995) dalam Barkemeyer (2007) dalam Machmud dan Djakman (2008) memberikan definisi mengenai *organizational legitimacy* sebagai berikut :

“legitimacy is generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions”.

Nasi, Philips, and Zyglidopoulos, 1997 dalam Nurhayati, Brown dan Tower, 2006 dalam Djakman menyatakan bahwa *“Legitimacy theory focuses of the adequacy of corporate social behavior”*. Hal ini berarti bahwa legitimasi merupakan *society judge* organisasi yang tercipta melalui *image* perusahaan yang mereka ciptakan sendiri. Masalah legitimasi terjadi ketika terdapat perbedaan antara *societal expectations* dengan *social behavior* (Nasi *et al*, 1997 dalam Nurhayati *et al* 2006) dalam machmud dan Djakman (2008).

Oleh karena itu, salah satu faktor yang dimasukkan oleh beberapa peneliti sebagai motif dibalik pengungkapan informasi sosial dan lingkungan adalah keinginan untuk melegitimasi operasi organisasi (Deegan, 2002).

Struktur teoritis dari banyak studi akuntansi mengandalkan pada kerangka teori legitimasi untuk menjelaskan mengapa manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan (Deegan dan Rankin, 1996; Campbell *et al.*, 2003; Mobus, 2005).

Sedangkan menurut Campbell *et al.* (2003) menyatakan bahwa teori legitimasi adalah teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan pelaporan dan pengungkapan informasi sosial dan lingkungan.

Lindolm (1994, hal. 2) dalam Deegan (2002), mendefinisikan legitimasi sebagai :

....sebuah kondisi atau status yang ada ketika sistem nilai entitas kongruen dengan sistem nilai masyarakat yang lebih luas dimana menjadi bagiannya. Ketika perbedaan baik aktual maupun potensial ada diantara dua sistem nilai, berarti terdapat ancaman terhadap legitimasi entitas.

(Deegan dan Rankin, 1996) menyatakan bahwa postulat dari teori legitimasi adalah organisasi tidak hanya memperhatikan hak-hak investor tetapi juga harus memperhatikan hak-hak publik.

Mathews (1993, hal. 26) dalam Deegan (2002) meyatakan bahwa :

Kontrak sosial akan muncul antara perusahaan dengan anggota masyarakat. Masyarakat (sebagai kumpulan atau individu) memberikan perusahaan kedudukan hukum dan atribut serta wewenang untuk memiliki dan menggunakan sumber daya alam dan untuk merekrut karyawan. Organisasi mengambil sumber-sumber dan hasil milik

masyarakat baik barang, jasa dan limbah produk kepada lingkungan. Organisasi tidak memiliki hak yang melekat terhadap keuntungan-keuntungan tersebut, dan untuk memungkinkan keeksistensian perusahaan, masyarakat akan mengharapkan keuntungan-keuntungan untuk menutup kerugian terhadap masyarakat.

Selain itu, Socker dan Sethi (1973, hal 67) dalam Deegan (2002)

memberikan pandangan tentang konsep kontrak sosial, yaitu :

Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan yang beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial- baik eksplisit maupun implisit – dimana kelangsungan hidup dan pertumbuhannya didasarkan pada :

- (1) Hasil akhir (output) yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas;
- (2) Distribusi manfaat ekonomi, sosial dan politik kepada kelompok sesuai dengan *power* yang dimiliki.

Di dalam masyarakat yang dinamis, tidak ada sumber *power* institusional dan kebutuhan hidup terhadap pelayanan yang bersifat permanen. Oleh karena itu, suatu institusi harus lolos uji legitimasi dan relevansi dengan cara menunjukkan bahwa masyarakat memang memerlukan jasa perusahaan dan kelompok tertentu yang memperoleh penghargaan (reward) yang diterinanya benar-benar mendapat persetujuan dari masyarakat.

Berdasarkan (cornier dan Gordon, 2001) teori legitimasi berdasarkan pada konsep bahwa organisasi memiliki kontrak dengan masyarakat dan untuk memenuhi kontrak-kontrak tersebut, perusahaan dapat melegitimasi organisasi dan aktivitasnya. Secara spesifik, konsep tersebut menganggap bahwa kelangsungan hidup organisasi akan terancam jika masyarakat menganggap organisasi melanggar kontrak sosialnya. Ketika masyarakat tidak puas karena organisasi tidak dapat diterima atau tidak beroperasi dengan sah, akibatnya masyarakat menarik kembali “ kontrak” organisasi dalam menjalankan operasional perusahaannya, contohnya dengan mengurangi permintaan perusahaan tersebut (Deegan, 2002).

Perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, 1994, dalam Haniffa et al, 2005). Jika terjadi ketidakselarasan antara sistem nilai perusahaan dengan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan legitimasinya, yang selanjutnya akan mengancam kelangsungan hidup perusahaan (Lindblom, 1994, dalam Haniffa et al, 2005).

2.1.2 Teori Stakeholder

Dalam pandangan *stakeholder*, perusahaan tidak hanya memiliki *stakeholder* tetapi memiliki *shareholder* (Riahi-Belkaoui, 2003) dalam Puspitasari (2009). Menurut Riahi Belkaoui (2003), kelompok *stake* tersebut meliputi pemegang saham, pelanggan, pemasok, karyawan, kreditor, pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan teori *stakeholder* (Guthrie, et al., 2004), manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai yang diharapkan *stakeholder* dan melaporkannya kepada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa para *stakeholder* memiliki hak untuk mengetahui semua informasi, baik informasi *mandatory* maupun *voluntary*, informasi keuangan maupun sosial, mengenai bagaimana kegiatan perusahaan berdampak kepada *stakeholder*. Dampak dari aktivitas perusahaan kepada *stakeholder* dapat diketahui melalui pertanggungjawaban yang diberikan perusahaan berupa informasi keuangan dan non-keuangan (sosial).

Menurut Machmud dan Djakman (2008) pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi didalam laporan tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi korporat kepada investor dan *stakeholders* lainnya. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2006 memberikan definisi sebagai berikut :

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

2. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melakukan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

3. Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus memangku

insiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2.1.3 Teori Agency

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berhubungan dengan teori agency karena pengungkapan CSR berhubungan dengan perilaku manajer. Hubungan keagenan adalah hubungan antara principal (pemilik) dengan agen (manajer) (Hendrikson Van Breda, 2000). Masalah keagenan timbul ketika principal membayar agen untuk memberikan jasanya dan principal juga memiliki wewenang terhadap agen dalam pengambilan keputusan.

Eishenhardt dalam Isnanta (2008) dalam Waryanto (2010) memakai asumsi tiga sifat dasar manusia yaitu : 1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*); 2) manusia memiliki persepsi terbatas mengenai menpersepsi masa mendatang (*bounded rationality*, dan 3) manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa manajer kemungkinan akan memiliki sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

Selain itu, permasalahan antara principal dan agen adalah ketika terjadi asimetri informasi. Manajer lebih mengetahui seluk beluk keuangan perusahaan dibandingkan pemilik. Oleh karena itu, manajer seharusnya memberikan penjelasan kepada pemilik mengenai keadaan keuangan yang sebenarnya. Akan tetapi, informasi keuangan tidak diterima sesuai dengan keadaan sebenarnya

(Hendrikson Van Breda, 2000). Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan kepentingan pemilik dan agen yang dapat menimbulkan *opportunistic* manajer.

2.2 Corporate Sosial responsibility

2.2.1 Pengertian dan Konsep CSR

Menurut (Daniri, 2008) CSR adalah sebuah media yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan tetapi pada *triple bottom lines* yaitu memperhatikan masalah ekonomi, sosial dan lingkungan. Sedangkan definisi CSR menurut ISO 26000

Responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on society and the invorenment through transparent and ethical behaviour that is consistent with sustainable development dan welfare of society; takes into account the expectations of stakeholders; is in compliance with applicable law and consistent international norms of behaviour; and is integrated throughout the organization.

Definisi CSR yang telah dijelaskan oleh ISO 26000 adalah tanggung jawab sosial merupakan dampak dari keputusan dan aktivitas perusahaan yang telah merugikan masyarakat, dan dampaknya pasti akan dirasakan oleh *stakeholders*.

2.2.2 Pengungkapan CSR di Indonesia

Menurut (Darwin, 2007) yang dikutip dalam Machmud dan Djakman (2008) pengungkapan kinerja lingkungan, sosial dan ekonomi di dalam laporan

tahunan atau laporan terpisah adalah untuk mencerminkan tingkat akuntabilitas, resposibilitas, dan transparansi korporat kepada investor dan stakeholders lainnya. Pengungkapan tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan komunikasi yang baik dan efektif antara perusahaan dengan publik dan *stakeholders* lainnya tentang bagaimana perusahaan telah mengintegrasikan *Corporate Sosial Responsibility*, lingkungan dan sosial dalam setiap aspek kegiatan operasinya.

Kewajiban pengungkapan CSR telah diatur dalam beberapa regulasi yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2004) paragraph Sembilan secara implisit menyarankan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial, yaitu sebagai berikut :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peran penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Pernyataan PSAK diatas menunjukkan suatu aturan yang mendasari perusahaan untuk peduli terhadap masalah-masalah sosial yang dapat diungkapkan melalui pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan CSR di dalam laporan tahunan atau laporan tambahan. Untuk mempertegas pentingnya pertanggungjawaban sosial pada *stakeholders*, pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang mengatur kewajiban perusahaan untuk menetapkan *corporate sosial responsibility* (CSR). Kewajiban tersebut termuat dalam undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 Pasal 66 dan Pasal 74. Pasal 66 ayat (2) bagian C menyebutkan bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perseroan

terbatas juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal 74 menjelaskan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Standar pengungkapan CSR yang telah berkembang di Indonesia merujuk pada GRI (Global Reporting Initiatives). Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen Akuntan Manajemen (IAM-KAM) atau sekarang dikenal dengan Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) merujuk standar yang dikembangkan oleh GRI dalam pemberian penghargaan Indonesia Sustainability Report Awards (ISRA) kepada perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam membuat laporan keberlanjutan atau *sustainability report*.

Dalam standar GRI (GRI, 2006), indikator kinerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang menyangkut hak asasi manusia, praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator mencapai 79 indikator, terdiri dari 9 indikator ekonomi, 30 indikator lingkungan hidup, 14 indikator praktik tenaga kerja, 9 indikator hak asasi manusia, 8 indikator kemasyarakatan, dan 9 indikator tanggung jawab produk.

Jadi dalam luas pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor, akan mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebutkan dalam GRI *guidelines*, minimal yang harus ada antara lain :

- 1) Indikator kinerja ekonomi, meliputi aspek kinerja Ekonomi, Keberadaan Pasar, dan Dampak Ekonomi tidak langsung.

- 2) Indikator kinerja Lingkungan Hidup meliputi aspek material, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, effluent dan limbah; produk dan jasa, aspek kesesuaian, transportasi, dan aspek secara keseluruhan.
- 3) Indikator kinerja praktik ketenagakerjaan dan lingkungan kerja meliputi aspek ketenagakerjaan, hubungan tenaga kerja/manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pendidikan dan pelatihan serta aspek keanekaragaman dan kesempatan yang sama.
- 4) Indikator kinerja hak asasi manusia, meliputi aspek praktik investasi dan pengadaan, aspek Non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan daya tawar kelompok, tenaga kerja anak, pegawai tetap dan kontrak, praktik keselamatan serta hak masyarakat (adat).
- 5) Indikator kinerja masyarakat, meliputi aspek kemasyarakatan, kebijakan mengenai korupsi, kebijakan umum/publik, perilaku anti persaingan, dan aspek kesesuaian.
- 6) Indikator kinerja tanggung jawab produk, yang meliputi aspek keselamatan dan kesehatan konsumen, labeling produk dan jasa, komunikasi pemasaran, privasi konsumen dan aspek kesesuaian.

2.2.3 Kepemilikan Asing

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia (Ramadhan 2010). (Suchman,1995 dalam Barkemeyer, 2007) menyatakan bahwa perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing melihat

keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholders melalui *home market* (pasar tempat beroperasi) yang diharapkan dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang. Eksistensi yang tinggi diperoleh dari *society judge* masyarakat atas *image* yang diciptakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dipilih sebagai media untuk memperlihatkan kepedulian kepada masyarakat disekitarnya dalam rangka membangun eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kepemilikan saham asing dalam perusahaan multinasional baik dalam bentuk *ownership* atau *trade* lebih di dukung dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Mahmud dan Djakman menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham asing dianggap lebih *concern* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini didasarkan atas negara-negara Eropa dan United of States sangat memperhatikan isu-isu sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar serta pencemaran air. Oleh karena itu, perusahaan multinasional lebih memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam beroperasi untuk menjaga legitimasi perusahaan.

2.2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien., *et.al*, dalam Ramadhan, 2010). Tingkat

kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar (lebih dari 5%) mengindikasikan bahwa kemampuannya untuk memonitor manajemen menjadi lebih besar (Arif, 2006) dalam Mahmud dan Djakman (2008). Hal ini juga dikemukakan oleh Shleifer dan Vishny (1986) dalam Barnea dan Rubin (2005) bahwa institusional *shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan.

Para pemegang saham yang memiliki kedudukan pada manajemen perusahaan, dengan prosentase kepemilikan saham ($>5\%$) dapat bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen (Faizal, 2004 dalam Arif 2006) dalam Mahmud dan Djakman (2008).

Dasar contoh pengungkapan CSR dalam kepemilikan institusi adalah perbankan di Eropa, yang menerapkan kebijakan dalam pemberian pinjaman hanya kepada perusahaan yang mengimplementasikan CSR dengan baik.

2.2.5 Tipe Industri

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengungkapan sosial pada berbagai perusahaan yang memiliki perbedaan karakteristik. Salah satunya adalah tipe industri (*industri profile*) yaitu industri *high profile* dan *low profile*.

Robberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) mendefinisikan industri high-profile adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Sedangkan low-profile companies didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki tingkat *consumer visibility* dan *political visibility* yang rendah.

Pada penelitian ini industri yang dikategorikan sebagai high profile adalah industri di bidang migas, pertambangan, kertas, agrobisnis, dan telekomunikasi. Alasan pemilihan industri tersebut adalah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan *regulated company*. Adapun regulasi yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut antara lain :

1. Undang-undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001
2. Undang-undang Pertambangan Umum No. 11 Tahun 1967
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 mengenai Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan
4. Undang-undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dimana menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi salah satunya mengikutsertakan peran masyarakat
5. Peraturan yang berhubungan dengan hak pengelolaan Hutan.

Penelitian ini mengacu pada (Hasibuan, 2001; Henry dan Murtanto, 2001; Utomo, 2000; Hackstone dan Milne, 1996; Sembiring, 2005) yang membagi kalsifikasi perusahaan high profile dan low profile. Perusahaan yang termasuk

dalam high profile adalah perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan, transportasi dan pariwisata. Sedangkan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan low profile adalah perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, retailer tekstil, produk personal dan produk rumah tangga.

Perusahaan high profile merupakan perusahaan yang mendapat sorotan dari masyarakat luas karena aktivitas operasinya berpotensi untuk berhubungan dengan masyarakat banyak. Oleh karena itu, pengungkapan tanggung jawab social perusahaan diperlukan sebagai media oleh perusahaan untuk mempertanggungjawabkan pelaporan kegiatan social yang telah diberikan kepada masyarakat.

2.2.6 Ukuran Perusahaan (Firm's Size)

Ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel dalam pengungkapan informasi tanggung jawab sosial perusahaan. Pada umumnya perusahaan besar memiliki informasi yang lebih lengkap sehingga besar kemungkinan pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial pada perusahaan besar tersebut. Suropto (1999) menyatakan bahwa perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas. Hal ini dikaitkan dengan teori agensi, dimana perusahaan yang besar yang memiliki biaya keagenan

yang besar akan mengungkapkan informasi secara luas untuk mengurangi biaya keagenan. Selain itu, perusahaan besar memiliki emiten yang banyak disoroti, sehingga pengungkapan yang lebih luas dapat mengurangi biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005).

Perusahaan yang besar, memiliki sumber daya yang besar sehingga perusahaan perlu dan mampu membiayai informasi untuk kepentingan internal secara lengkap. Informasi yang lengkap sekaligus menjadi bahan untuk keperluan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal sehingga tidak memerlukan biaya lagi untuk pengungkapan informasi secara lengkap. Sebaliknya, perusahaan kecil tidak memiliki informasi selengkap perusahaan besar, sehingga biaya yang diperlukan menjadi lebih besar apabila perusahaan ingin mengungkapkan informasi secara lengkap. Hal ini dikarenakan pada umumnya perusahaan kecil berada pada situasi persaingan ketat sehingga dapat mengancam perusahaan. Seperti yang dijelaskan oleh (Buzby, 1975 dalam Marwata 2001) bahwa mengungkapkan informasi yang terlalu banyak pada perusahaan kecil tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan nilai *log total asset*.

2.2.7 Status Perusahaan

Status perusahaan terbagi menjadi perusahaan BUMN dan Non BUMN. Berdasarkan SK No. 236/MBU/2003 bahwa perusahaan BUMN diwajibkan untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui PKBL.

Perusahaan BUMN lebih luas dalam mengungkapkan tanggung jawab social perusahaan (*CSR Disclosure*) karena perusahaan BUMN sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara atau rakyat. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, BUMN diawasi langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari rakyat (Yuliarto, 2001).

(Program Kemiteraan dan Bina Lingkungan). PKBL terdiri dari dua program yaitu PK yang berarti Program Kemitraan dan BL yang berarti Bina Lingkungan. Program kemitraan diberikan dalam bentuk dana kepada masyarakat yaitu :

a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja

Dana ini digunakan untuk pembiayaan modal kerja atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan penjualan.

b. Pinjaman khusus

Dana ini diberikan untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;

c. Beban Pembinaan

1. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan;
2. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya bersifat 20 persen dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;

3. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

Program bina lingkungan (BL) adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui dua pemanfaatan dari bagian laba BUMN, maksimal dua persen dari laba setelah pajak. Sumber dananya bisa juga dari hasil bunga deposito atau dana jasa giro dari dana program BL. Ruang lingkup program BL adalah untuk korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan atau sarana umum, bantuan untuk prasarana ibadah, dan bantuan untuk pelestarian alam.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia berkaitan dengan CSR antara lain oleh Sembiring (2005) berusaha meneliti beberapa faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia. Variabel independen yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan leverage perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan, profil perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia.

Anggraini (2006) mengamati tingkat pengungkapan CSR dan menguji faktor-faktor penentuan yang digunakan perusahaan sebagai pertimbangan untuk mengungkapkan CSR. Penelitian ini menggunakan kategori pelaporan kelestarian

perusahaan (*corporate sustainability reporting*) dari Darwin (2004), antara lain kinerja lingkungan, kinerja ekonomi, dan kinerja sosial dengan mengambil data penelitian dari semua sektor perusahaan yang listing di BEI tahun 2000-2004. Penelitian ini menggunakan lima variabel yang dapat dipertimbangkan, yaitu faktor kepemilikan manajemen, hutang, ukuran, tipe perusahaan, dan profitabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen dan jenis industri menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk mengungkapkan CSR.

Penelitian yang dilakukan oleh Sitepu dan Siregar tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Jakarta. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 2007. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Ukuran dewan komisaris, *financial leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas. Sedangkan variabel dependennya adalah pengungkapan informasi sosial. Hasil dari penelitian ini yaitu Ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan variabel ukuran dewan komisaris dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR

Macmud dan Djakman (2008) mengadakan penelitian untuk menyelidiki pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan institutional sebagai pertimbangan perusahaan dalam pengungkapan CSR pada perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2006. Variabel Independen yang digunakan adalah kepemilikan asing dan

kepemilikan institusional, sedangkan variabel dependennya adalah CSR Disclosure. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial, dan kepemilikan institusional juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Sayekti dan Wondabio tentang pengaruh CSR Disclosure terhadap *earning response coefficient* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tahun 2007. Variabel dependennya CSR disclosure sedangkan variabel independennya adalah *unexpected earnings* (UE). Hasil penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh negatif terhadap ERC.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Tujuan	Metode Analisis	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Sembiring (2005)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR di perusahaan Indonesia	Regresi berganda	- Independen ukuran perusahaan, profil perusahaan, ukuran dewan komisaris, profitabilitas, dan leverage perusahaan - Dependen CSR Disclosure	berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan, profil perusahaan, dan ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan di Indonesia.

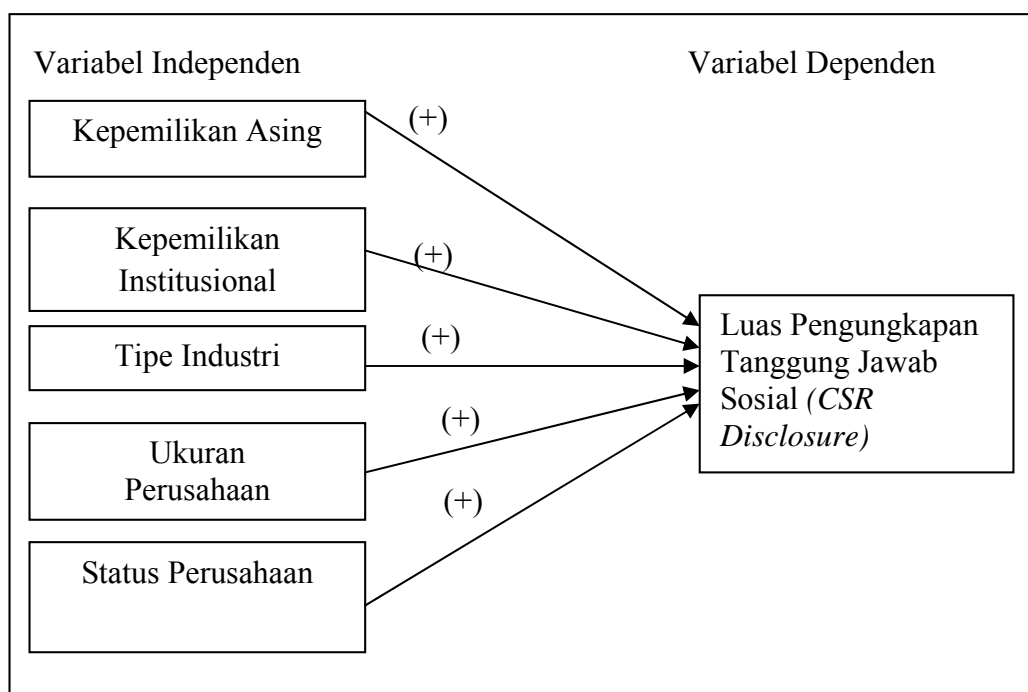
2.	Anggraini (2006)	Tingkat pengungkapan CSR dan menguji faktor-faktor penentuan yang digunakan perusahaan sebagai pertimbangan untuk mengungkapkan CSR	Regresi berganda	-Independen faktor kepemilikan manajemen, hutang, ukuran, tipe perusahaan, dan profitabilitas -Dependen CSR Disclosure	kepemilikan manajemen dan jenis industri menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan untuk mengungkapkan CSR.
3.	Sitepu dan Siregar (2007)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi sosial dalam laporan tahunan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Jakarta	Regresi berganda	-Independen Ukuran dewan komisaris, financial laverage, ukuran perusahaan, profitabilitas Dependen Pengungkapan informasi sosial	1. Ukuran perusahaan dan laverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial. 2. Variabel ukuran dewan komisaris dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR
4.	Machmud dan Djakman (2008)	pengaruh kepemilikan asing dan kepemilikan institutional sebagai pertimbangan perusahaan dalam pengungkapan CSR pada perusahaan yang tercatat di BEI	Regresi berganda	-Independen Kepemilikan Asing dan kepemilikan institusional -Dependen CSR Disclosure	Kepemilikan asing dan kepemilikan institusi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan CSR Disclosure.

		tahun 2006			
5.	Sayekti dan Wondabio (2007)	Pengaruh CSR disclosure terhadap earning response coefficient	Regresi berganda	-Independen CAR -Dependen Unexpected Earnings (UE) dan CSR Disclosure	Tingkat pengungkapan informasi CSR dalam laporan tahunan berpengaruh negatif terhadap ERC.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini akan dijelaskan kerangka pemikiran penelitian. Kerangka pemikiran penelitian menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel dependennya adalah Corporate Sosial Responsibility (*CSR Disclosure*) sedangkan variabel independennya adalah kepemilikan asing, kepemilikan institusional, tipe industri, ukuran perusahaan, status perusahaan.

Gambar 2.1
Hubungan variabel independen terhadap variabel dependen



2.5 Pengembangan Hipotesis

(Suchman, 1995 dalam Barkemeyer, 2007) dalam Machmud dan Djakman (2008) menyatakan bahwa perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing melihat keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholders melalui *home market* (pasar tempat beroperasi) yang diharapkan dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang. Eksistensi yang tinggi diperoleh dari *society judge* masyarakat atas *image* yang diciptakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang dipilih sebagai media untuk memperlihatkan kepedulian kepada masyarakat disekitarnya dalam rangka membangun eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, kepemilikan saham asing dalam perusahaan multinasional baik dalam bentuk *ownership* atau *trade* lebih mendukung dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain itu, (Simerly dan Li, 2001; Fauzi, 2006 dalam Machmud dan Djakman) menyatakan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham asing dianggap lebih *concern* dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini didasarkan atas negara-negara Eropa dan United of States sangat memperhatikan isu-isu sosial seperti pelanggaran hak asasi manusia, pendidikan, tenaga kerja, dan isu lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar serta pencemaran air. Oleh karena itu, perusahaan multinasional lebih memperhatikan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam beroperasi untuk menjaga legitimasi perusahaan.

Penelitian Tanimoto dan Suzuki (2005) dalam melihat luas adopsi GRI dalam laporan tanggung jawab sosial pada perusahaan publik di Jepang, membuktikan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong terhadap adopsi GRI dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Sedangkan penelitian Susanto (1994) dan Marwata (2006) dalam Marwata (2006) meneliti luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di BEJ, menemukan pemilikan saham oleh investor asing tidak memiliki hubungan dengan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan.

Berdasarkan asumsi bahwa negara-negara asing cenderung lebih perhatian dalam aktivitas maupun pengungkapan tanggung jawab sosial, maka penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR Disclosure*).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri serta institusi lainnya pada akhir tahun (*Shien., et.al*, dalam Ramadhan, 2010)

Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku *opportunistic* manajer. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar (lebih dari 5%) mengindikasikan bahwa kemampuannya untuk memonitor manajemen menjadi lebih besar (Arif, 2006). Hal ini juga dikemukakan oleh Shleifer dan Vishny (1986) dalam Barnea dan

Rubin (2005) bahwa institusional *shareholders*, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat menjadi pendorong bagi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Penelitian yang menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh Barnea dan Rubin (2005) yaitu melihat CSR sebagai konflik berbagai shareholder menunjukkan hasil bahwa *institutional ownership* tidak memiliki hubungan terhadap CSR. Selain itu, penelitian Mani (2004) dalam Kasmadi dan Susanto (2006) menguji faktor-faktor yang menentukan luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan di India, menemukan *financial institution investment* tidak berhubungan secara signifikan terhadap pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan perusahaan di India. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Djakman (2008) tentang pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dari uraian diatas, penelitian ini akan menguji kembali pengaruh kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan dengan mengujikan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR Disclosure*).

Kelompok industri *high profile* adalah industri migas, pertambangan, kertas, agribisnis dan telekomunikasi (Machmud dan Djakman, 2008). Dalam penelitian ini menggunakan acuan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hasibuan, 2001; Henry dan Murtanto, 2001; Utomo, 2000; Hackstone dan Milne, 1996; Sembiring, 2005) yang membagi klasifikasi perusahaan *high profile* dan *low profile*. Perusahaan yang termasuk dalam *high profile* adalah perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan, transportasi dan pariwisata. Sedangkan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan *low profile* adalah perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, supplier peralatan medis, retailer tekstil, produk personal dan produk rumah tangga.

Selain itu, perusahaan *high profile* merupakan perusahaan yang mendapat sorotan dari masyarakat luas karena aktivitas operasinya berpotensi untuk berhubungan dengan masyarakat banyak. Penelitian yang telah membuktikan pengaruh yang signifikan antara tipe industri dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah penelitian Hackstone dan Milne (1996), Utomo (2000) yang dijelaskan dalam Sembiring (2005). Oleh karena itu, peneliti akan meneliti kembali hubungan tipe industri terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial sehingga ditariklah hipotesis :

H3 : Tipe industri berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR Disclosure*).

Ukuran perusahaan digunakan sebagai salah satu variable independen dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena pada umumnya perusahaan besar memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan perusahaan kecil sehingga pengungkapan informasi tanggung jawab sosial lebih besar dari pada perusahaan kecil.

Suripto (1999) menyatakan bahwa perusahaan besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar, penjualan besar, *skill* karyawan yang baik, sistem informasi yang canggih, jenis produk yang banyak, struktur kepemilikan lengkap, sehingga membutuhkan tingkat pengungkapan secara luas.

Perusahaan yang besar memiliki kegiatan operasi yang lebih banyak dari pada perusahaan kecil. Oleh karena itu, perusahaan lebih memperhatikan masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat karena secara langsung atau pun tidak langsung perusahaan memberikan dampak baik maupun buruk bagi masyarakat. Penelitian menyangkut ukuran perusahaan telah dilakukan disebutkan dalam Hackstone dan Milne dalam Sembiring bahwa ukuran perusahaan yang tidak mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan oleh Roberts (1992), Singh dan Ahuja (1983) dalam Sembiring (2005). Sedangkan penelitian yang menemukan hubungan antara ukuran perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial dilakukan oleh Tanimoto dan Suzuki Tahun 2005, dan Sembiring (2005). Dari perbedaan hasil penelitian ini, peneliti ingin meneliti kembali variable ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial sehingga ditariklah kesimpulan :

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR Disclosure*).

Status perusahaan terbagi dalam perusahaan BUMN dan Non BUMN. Perusahaan BUMN memiliki kewajiban dalam pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan SK No. 236/MBU/2003. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan BUMN memiliki kewajiban corporate social responsibility melalui program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Dengan adanya program PKBL, perusahaan BUMN memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, perusahaan BUMN adalah perusahaan negara yang memiliki tanggung jawab sosial yang besar kepada masyarakat karena kegiatan operasinya sebagian besar berhubungan dengan masyarakat. Perusahaan BUMN lebih luas dalam memberikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dibandingkan perusahaan Non BUMN karena perusahaan BUMN adalah perusahaan milik negara (rakyat). Dalam melakukan aktivitasnya perusahaan BUMN tidak terlepas dari pengamatan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada tekanan politis agar perusahaan BUMN memberikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih luas (Yuliarto, 2001). Dari uraian ini, maka dapat disimpulkan suatu hipotesis yaitu :

H5 : Status perusahaan BUMN berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR Disclosure*).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penelitian ini menganalisis secara empiris variabel-variabel yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial (*CSR Disclosure*). Oleh karena itu, diperlukan pengujian hipotesis . Pengujian hipotesis dilakukan menurut metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti agar mendapatkan hasil yang akurat.

Adapun definisi operasional atas variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Sosial responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Pengungkapan sosial adalah data tahunan yang diungkapkan perusahaan yang diperoleh melalui *Corporate Sosial Disclosure Index* (CSDI) dengan menggunakan indikator GRI meliputi *economic, environment, labor practices, human rights, society, dan product responsibility*.

Pengukuran variabel ini dengan memberikan skor. Perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan indikator GRI di beri skor 1 sedangkan perusahaan yang tidak melakukan

pengungkapan tanggung jawab sosial atau perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial tetapi tidak sesuai dengan indikator GRI diberi angka 0. Indeks pengungkapan dengan indikator GRI terdiri dari 79 item. Indeks perhitungan luas pengungkapan CSR adalah :

$$CSDI_t = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{79}$$

(Weber, 1988 dalam Sembiring, 2005) pengukuran indeks pengungkapan CSR dilakukan metode analisis (*content analysis*) suatu pengkodifikasian teks dengan cirri-ciri yang sama ditulis dalam kelompok atau kategori berdasarkan kinerja yang ditentukan. Pengukuran luas pengungkapan CSR ini dilakukan secara *non repeated* artinya hanya menghitung satu kali untuk setiap item tanpa mempertimbangkan item tersebut diungkapkan lagi dalam halaman atau bagian lain dengan bahasa yang berbeda. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan melihat item-item pengungkapan yang termuat dalam laporan tahunan saja tanpa melihat dan mengukur kembali luas pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan khusus seperti *sustainability report*, dikarenakan tidak semua perusahaan menerbitkan *sustainability report*.

3.1.2 Variabel Independen

Yang termasuk dalam variabel independen adalah :

3.1.2.1 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dalam penelitian ini menggunakan prosentase kepemilikan saham asing (>5%) yang dilihat dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2009.

3.1.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusi (> 5%) dalam penelitian ini menggunakan prosentase kepemilikan saham institusi yang dilihat dalam laporan tahunan perusahaan tahun 2009.

3.1.2.3 Tipe Industri

Robberts (1992) dalam Hackston dan Milne (1996) mendefinisikan industri high-profile adalah industri yang memiliki visibilitas konsumen, risiko politis yang tinggi, atau menghadapi persaingan yang tinggi. Sedangkan *low-profile companies* didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki tingkat *consumer visibility* dan *political visibility* yang rendah.

Pada penelitian ini industri yang dikategorikan sebagai high profile adalah industri di bidang migas, pertambangan, kertas, agrobisnis, dan telekomunikasi. Alasan pemilihan industri tersebut adalah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan *regulated company*. Adapun regulasi yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut antara lain :

1. Undang-undang Minyak dan Gas Bumi No. 22 Tahun 2001

2. Undang-undang Pertambangan Umum No. 11 Tahun 1967
3. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 mengenai Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan
4. Undang-undang Telekomunikasi No. 36 Tahun 1999 dimana menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan telekomunikasi salah satunya mengikutsertakan peran masyarakat
5. Peraturan yang berhubungan dengan hak pengelolaan Hutan.

Perusahaan yang dikategorikan dalam tipe high profile diberi angka satu (1) dan perusahaan yang dikategorikan dalam low profil diberi angka nol (0)

3.1.2.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan variabel penduga yang banyak digunakan untuk menjelaskan variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan. Perusahaan besar merupakan emiten yang paling banyak disoroti oleh publik sehingga pengungkapan yang lebih besar merupakan pengurangan biaya politis sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan (Sembiring, 2005). Dalam penelitian ini, jumlah aktiva (*log asset*) yang dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dalam laporan tahunan perusahaan pada tahun 2009 merupakan proksi dari ukuran perusahaan.

3.1.2.5 Status Perusahaan

Perusahaan BUMN memiliki kewajiban dalam pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) melalui program PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) dibandingkan perusahaan Non BUMN. Program PKBL untuk perusahaan BUMN didasarkan pada SK No. 236/MBU/2003. Perusahaan yang dimasukkan dalam status BUMN diberi angka 1 sedangkan perusahaan Non BUMN diberi angka nol.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009. Penelitian ini hanya melihat pengungkapan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan perusahaan pada tahun 2009. Peneliti menggunakan tahun 2009 dikarenakan regulasi pemerintah UU No. 40 Tahun 2007 dan UU Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 yang berisi tentang kewajiban pengungkapan tanggung jawab perusahaan bagi perseroan terbatas mulai berlaku pada tanggal akhir 2007 sedangkan perusahaan biasanya melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit pada pertengahan tahun berikutnya. Oleh karena itu, setelah tahun 2007, perusahaan telah dianggap banyak yang melaporkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Atas dasar itulah peneliti menggunakan tahun 2009 untuk melakukan penelitian.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *judgement sampling*, yaitu salah satu bentuk *purposive sampling* dengan

mengambil sampel yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan maksud dan tujuan penelitian dengan kriteria sebagai berikut :

1. Perusahaan menerbitkan dan mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) periode 2009 secara lengkap.
2. Laporan tahunan (*annual report*) yang diterbitkan perusahaan memenuhi ketentuan Bapepam-LK
3. Memiliki data yang lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa laporan tahunan (*annual report*) yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada (<http://www.idx.co.id>), data base pasar modal pojok BEI Fakultas Ekonomi UNDIP Semarang, dan situs web resmi masing-masing perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran dan pencatatan informasi yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan tahunan perusahaan periode 2009.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Metode Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik harus diujikan dalam penelitian ini, untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pembiasan estimasi karena tidak semua data dapat diterapkan regresi. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji Multikolinearitas, dan uji Heteroskedastitas.

3.5.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009). Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan analisis grafik histogram dan grafik normal probability plot dan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (l-sample K-S)*.

Dasar pengambilan keputusan dengan analisi grafik normal probabiliti plot adalah (Ghozali, 2009):

1. Jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z* (*I- Sample K-S*) adalah (Ghozali, 2009):

1. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.1.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya *vaiance inflation faktor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain (Ghozali, 2009). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik *scatterplot* antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID). Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali,2009):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2 Analisis Regresi Berganda

Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan serangkaian tahap untuk menghitung dan mengelola data tersebut, agar dapat mendukung hipotesis yang telah diajukan.

Adapun tahap-tahap penghitungan dan pengolahan data sebagai berikut:

1. Menghitung karakteristik implementasi CSR Disclosure perusahaan yang diproksikan dalam Kepemilikan asing, kepemilikan institusi, ukuran industri, tipe industri dan kategori BUMN dan Non BUMN.

2. Menghitung indeks CSR yang diungkapkan dalam laporan tahunan dengan membandingkan dengan standar GRI.
3. Menghitung Model Regresi.

Metode regresi linier berganda (*multiple regression*) dilakukan terhadap model yang diajukan peneliti dengan menggunakan software SPSS Versi 17.0 untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara *CSR Disclosure* dengan struktur kepemilikan, diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$CSDI_i = \beta_0 + \beta_1 ASING_i + \beta_2 INST_i + \beta_3 TIPE_i + \beta_4 AKT_i + \beta_5 BUMN/NON_i + \varepsilon$$

Keterangan:

CSDI	: <i>Corporate Sosial Disclosure Index</i> perusahaan j berdasarkan Indikator GRI
ASING _i	: persentase kepemilikan asing (> 5%)
INST _i	: persentase kepemilikan institusi (>5%)
TIPE _i	: Tipe Industri, <i>high profile</i> = 1, <i>low profile</i> = 0
SIZE _i	: Ukuran perusahaan, <i>log asset</i>
BUMN/Non	: Perusahaan BUMN = 1, Non BUMN = 0
β ₀ - β ₂	: Koefisien yang di estimasi
ε _i	: <i>error term</i>
i	: 1,2,..., N
dimana	N : banyaknya observasi

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Ada dua jenis alat uji statistik dalam menguji hipotesis yaitu alat uji parametrik dan non parametrik. Uji parametrik digunakan untuk menguji jika distribusi data yang digunakan normal sedangkan uji non parametrik digunakan apabila distribusi data yang digunakan tidak normal.

Statistik parametrik digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai sekelompok data yang menjadi sumber sampel (J. Supranto, 2001 dalam Rosmasita, 2006). Menurut Ghazali (2009) ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi agar uji statistik parametrik dapat digunakan yaitu :

1. Observasi harus independen
2. Populasi awal observasi harus berdistribusi normal
3. Analisis dalam dua grup harus menggunakan populasi yang sama dalam setiap grup
4. Variabel harus diukur paling tidak dalam skala interval.

Jika distribusi data bersifat normal, maka menggunakan uji statistik parametrik. Uji regresi merupakan salah satu uji statistik parametrik, sedangkan untuk menguji hipotesis yang digunakan peneliti yaitu : uji pengaruh simultan (F), uji koefisien determinasi, dan uji pengaruh parsial (t test).

3.5.3.1 Uji Pengaruh Simultan (F test)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat significance level 0,05 $\alpha = 0,05$. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bila nilai $F < 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima yang berarti koefisien regresi signifikan, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen

2. Bila nilai $F > 0,05$, maka H_0 diterima atau H_a ditolak yang berarti koefisien regresi tidak signifikan. Hal ini artinya variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.3.2 Uji koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variabel independen, tetapi karena R^2 mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model, maka dalam penelitian ini menggunakan *adjusted* R^2 berkisar antara 0 dan 1. Jika nilai *adjusted* R^2 semakin mendekati 1 maka makin baik kemampuan model tersebut dalam menjelaskan variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Parsial (t test)

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha=0,05$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bila nilai signifikansi $t < 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $t > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.